

**THE CASE SETTLEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL
ACTION WHICH THE RESULTS BECOME
THE OBJECT OF MORTGAGE RIGHT**

Nurul Aji Wulandari

Faculty of Law University of Muhammadiyah Jember

Abstract

This study discussed about the case settlement of corruption criminal action which the results become the object of mortgage right. In its settlement came 2 (two) interests, firstly the interest of seizure by the state because it was the result of corruption and second was the interest of execution by banking institutions because in principle the guarantee was a debt repayment by the debtor to the creditor for a sum of borrowed money.

This study was a type of descriptive normative legal research. In its preparation used two (2) kinds of approaches, namely the statute approach and the conceptual approach.

In relation of the corruption cases which resulted the object of the mortgage right, the state had the right to carry out seizure. However the authority of the court to carry out the seizure of the mortgage right object was only limited to securing evidence rather than transferring ownership rights. In the interests of state compensation, the state had the right to obtain other assets belonging to the corruptor whose value was equivalent to the value of money which had been corrupted, or be punished by imprisonment whose duration did not exceed the maximum threat of the criminal matter.

Keywords: Corruption Criminal Action, Mortgage Rights

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG HASIL KORUPSINYA MENJADI
OBJEK HAK TANGGUNGAN**

Nurul Aji Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya menjadi objek hak tanggungan. Dalam penyelesaiannya timbul 2 (dua) kepentingan, *pertama* kepentingan penyitaan oleh negara karena merupakan hasil tindak pidana korupsi dan *kedua* menjadi kepentingan eksekusi oleh lembaga perbankan karena pada prinsipnya jaminan tersebut adalah sebagai pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur atas sejumlah uang yang telah dipinjam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dalam penyusunannya menggunakan dua (2) macam pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kaitannya dalam perkara tindak pidana korupsi yang hasilnya menjadi Objek Hak Tanggungan, Negara berhak melakukan penyitaan, Namun kewenangan pengadilan dalam melakukan penyitaan objek jaminan Hak Tanggungan tersebut hanya sebatas mengamankan barang bukti bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan. Dalam kepentingan penggantian kerugian negara, negara berhak memperoleh aset lain milik koruptor yang nilainya setara dengan nilai uang yang telah dikorupsi, atau dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana Pokoknya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hak Tanggungan